

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Arif, M., & Adhawati, S. (2012). *Modul Kuliah: Manajemen Sektor Publik*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). California: SAGE Publications.
- Djamarah, S. B. (2011). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kerlinger, F. N. (2000). *Asas-Asas Penelitian Behavioral* (G. M. A. Purwanto, Penerj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manan, B. (2004). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muin, I. (2013). *Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII Jilid 3*. Jakarta: Erlangga.
- Mundayat, A. A., Noerdin, E., Agustini, E., Aripurnama, S., & Wahyuni, S. (2010). *Target MDGs Menurunkan Angka Kematian Ibu-Tahun 2015 Sulit Dicapai*. Jakarta: Women Research Institute (WRI).
- Ndraha, T. (2000). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Siagian, S. P. (2003). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, E. (2010). *Manajemen Pemerintahan Daerah dan Aparatur Peranannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wasistiono, S. (2013). *Pengantar Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jatinangor: IPDN Press.

Jurnal :

Azmi, F. (2025). Kebijakan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia: Dampak dan Tantangan dalam Pengelolaan Kesehatan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 101–112.

Baumann-Ylinen, M. (2017). Prevention: Primary, Secondary, Tertiary. Dalam *Encyclopedia of Behavioral Medicine*. Springer, Cham.

Charmut. (2022). Implementasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Tertinggal. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(2).

Ginting, P. I., & Sagita, N. I. (2025). Manajemen Investasi Publik dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan di Indonesia. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, 21(2), 150–165.

Hikma Dian Sari. (2022). Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*.

Husnul Khotimah. (2020). Hubungan Kebijakan Fiskal Desentralisasi dengan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(4).

Irfan, M., et al. (2026). Tata Kelola Masyarakat Pesisir dalam Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar. *Jurnal Private Law, University of Mataram*, 6(2), 610–625.

Luti, I., et al. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan di Kabupaten Lingga. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*

Indonesia (JKKI), 1(1), 20–30.

- Marasabessy, M. D., & Rauf, A. (2020). Aksesibilitas dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 9(2), 75–83.
- Mukhlisin, et al. (2024). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pulau Pisang Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 2022. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 13(1), 89–96.
- Putri, C. N. D., & Handartini, F. D. Y. (2023). Peran Pemerintah dalam Membenahi Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 67–74.
- Putri, S. A., & Handayani, W. (2022). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Masalah Kesehatan Lingkungan di Wilayah Pesisir. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 45–58.
- Ran, Sultan, et al. (2024). Tantangan Peran Pemerintah Daerah Mengelola Fasilitas Kesehatan Primer di Kepulauan. *Teluk Kembar*, 17(3), 173–184.
- Ras, A., et al. (2020). Tantangan dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Takalar. *Publico: Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 1574–1585.
- Rianawati, A. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Efisiensi Operasional. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 45–58.
- Roidah Hutabalian. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah. *Jurnal Hukum*, 7(2), 285–295.
- Saputra, A., et al. (2023). Strategi Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(6), 523–529.
- Sari, D. P. (2023). Optimalisasi Puskesmas di Wilayah Kepulauan: Peran Pemerintah Daerah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 18(1), 45–59.
- Tungga, B. D. (2023). Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan

Kesehatan Pasca Disahkannya Omnibus Law Tentang Kesehatan. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 287–300.

Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2025). *Peran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Mengendalikan Kasus Penyakit Malaria (Studi Kasus Kecamatan Gunung Kijang)*. Repository UMRAH.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi :

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Buku Seri II Strategic Foresight BPK: Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19*. Jakarta: BPK RI.

BPJS Kesehatan. (2024). *Buku FAQ Panduan Layanan Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: BPJS Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2023*. Bintan: Dinkes Kab. Bintan.

Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. (2025). *Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit: Bidang Pelayanan Medik*. Palangkaraya: Dinkes Kalteng.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Laporan Kinerja Kemendagri*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). *Buku Panduan Indeks Desa 2024*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Transformasi Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Buku Pedoman Tata Kelola Pelayanan Medik*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1335. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Bintan. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan*. Bintan.
- Pemerintah Kabupaten Bintan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026*. Bintan.
- Pemerintah Kabupaten Bintan. (2023). *Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024*. Bintan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 150. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 2. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 10. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105. Jakarta.

SDG Center Universitas Padjadjaran. (2020). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad.

